

**MODUL
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I**

Isu Strategis Kebijakan

**LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA
2021**

Hak Cipta © pada:

Lembaga Administrasi Negara

Edisi Tahun 2021

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

ISU STRATEGIS KEBIJAKAN

Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
2. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm.

PENULIS MODUL:

Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm.

REVIEWER: Dr. Adi Suryanto, M.Si.

EDITOR: Gine Tendriana, S.E., M.Ec.

KATA PENGANTAR

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, *networking*, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Penyelenggaraan pelatihan menjadi bidang yang wajib mengikuti perkembangan teknologi. Orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran *e-learning*. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan mindset dalam pengembangan kompetensi ASN dimana pembelajaran jarak jauh melalui *e-learning* menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman.

Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ISU STRATEGIS KEBIJAKAN	4
A. ISU STRATEGIS	4
B. KOLABORASI	5
C. RANGKUMAN	8
BAB III KEBIJAKAN NASIONAL	10
A. DEFINISI KEBIJAKAN NASIONAL	10
B. CAKUPAN KEBIJAKAN NASIONAL	11
C. PERMASALAHAN KEBIJAKAN NASIONAL	12
D. RANGKUMAN	13
BAB IV STRATEGI DELIVERY PEMBELAJARAN	14
A. CERAMAH ISU STRATEGIS	14
B. NARASUMBER ISU TERKAIT	14
C. METODE	15
D. BENCHMARKING KEBIJAKAN	15
E. POLICY PAPER	16
F. RANGKUMAN	16
BAB V	17
PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Japan Society 5.0.....	5
Gambar 2. SDGs Goal No. 17	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model Collaborative Governance.....	7
Tabel 2. South-East Asia Regulatory Quality.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

Sustainability Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga saat ini sudah berjalan 6 tahun sejak dicanangkan pada tahun 2015 yang lalu. SDGs merupakan upaya tindak lanjut dari Agenda 21 yang pertama kali diluncurkan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 di New York, Amerika Serikat. SDGs yang diadopsi oleh seluruh anggota PBB diharapkan dapat menjawab 17 (tujuh belas) tujuan yang berhasil diimplementasikan dengan baik sampai dengan pada target tahun 2030.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah tujuan nomor 17 (tujuh belas) yaitu *Partnership for the goals* atau dikenal dengan Kemitraan untuk mencapai tujuan. Kolaborasi menjadi aksi penting dalam membangun dan memperkuat pilar-pilar SDGs yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Pilar terakhir menjadikan visi *Smart Governance* di tubuh birokrasi menjadi semakin relevan dan kompetensi wajib yang dimiliki para pejabat tinggi ASN, khususnya pada level Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya).

Pada era yang cenderung disruptif seperti sekarang ini, JPT Madya perlu memperhatikan wawasan *outward looking* sehingga tidak hanya terpaku pada urusan domestik yang sudah menjadi bagian dari *business as usual*. JPT Madya perlu *aware* terhadap isu strategis yang berkembang di sektor global dan menjadi agen pemerintah untuk menjalin kolaborasi

dengan *stakeholders* global sehingga kemitraan antar bangsa dapat terwujud dengan baik.

Kementerian PAN dan RB (Kemenpan RB) telah menuangkan standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh para pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi di birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. JPT Madya dapat menjadikan peraturan ini sebagai pedoman atau pijakan dalam membangun kemitraan atau kolaborasi yang baik dan tanggap dalam menangkap isu-isu strategis yang berkembang saat ini, baik isu strategis global maupun di lingkup domestik.

Modul ini secara lengkap akan membahas tentang isu-isu strategis global yang lahir dari perkembangan saat ini maupun agenda yang lahir dari SDGs. Selain itu, kolaborasi menjadi langkah penting yang wajib dilakukan oleh para JPT Madya dalam menyikapi isu strategis dimaksud. Lebih lanjut, modul pada mata pelatihan Isu Strategis ini akan mengantarkan para peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I untuk membantu pelaksanaan *Benchmarking* Kebijakan dan penyusunan *Policy Paper* yang menjadi rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional *Smart Governance*.

Strategi *Delivery* Pembelajaran pada modul ini akan disampaikan melalui Ceramah dari para narasumber atau *expert* yang terkait dengan materi pokok tentang isu aktual dan strategis nasional, regional maupun global, serta alternatif strategi kebijakan yang efektif bagi organisasi dan isu strategis terkait dengan tema *benchmarking* kebijakan.

Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami tema pembelajaran dan menumbuhkembangkan kepekaan terhadap isu aktual dan isu strategis nasional, regional, dan global dalam rangka penyusunan alternatif strategi kebijakan yang efektif dan kolaboratif.

Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menganalisis isu strategis nasional, regional, dan global dalam rangka penyusunan alternatif strategi kebijakan yang efektif dan kolaboratif.

Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan isu-isu strategi tentang:

- (1) mengidentifikasi isu aktual dan strategis nasional, regional, dan global; dan
- (2) menyusun alternatif strategi kebijakan yang efektif dan kolaboratif.

Materi Pokok

Materi pokok mata pelatihan ini sebagai berikut:

- (1) mengidentifikasi isu aktual dan strategis nasional, regional, dan global; dan
- (2) menyusun alternatif strategi kebijakan yang efektif dan kolaboratif.

BAB II

ISU STRATEGIS KEBIJAKAN

A. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi dimana serangkaian kejadian atau *event* yang sedang terjadi pada saat ini dan mengambil perhatian banyak pihak. Isu tersebut dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan sangat berpengaruh terhadap jalannya kehidupan kedepannya. Bagi organisasi, isu strategis perlu disikapi dengan penyiapan langkah-langkah strategis yang akan diambil kedepannya dalam mewujudkan visi organisasi.

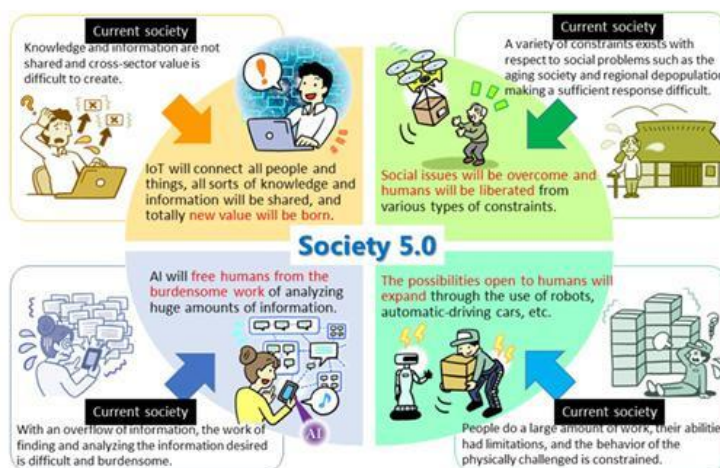
Ambler dalam Asrar (2018) menjelaskan bahwa Isu Strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan bisnis sebuah perusahaan. Sedangkan, bagi Ansoff dalam Asrar (2018) Isu Strategis diartikan sebagai sebuah perkembangan ke depan baik yang terjadi di dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Secara spesifik, Dutton dalam Asrar (2018), Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan- perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan tren-tren yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi.

Berdasarkan teori para ahli di atas, semakin jelas bahwa para pemimpin khususnya yang menduduki JPT Madya perlu memperhatikan isu strategis sebagai acuan terkini. Secara tidak langsung, JPT Madya diuji untuk dapat mengimplementasikan standar kompetensi pada aspek “Mengelola Perubahan” dan “Pengambilan Keputusan” yang wajib dimiliki

sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

B. Kolaborasi

Kolaborasi saat ini menjadi frasa yang sangat populer dalam era Perkembangan Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut beralasan karena era Revolusi Industri 4.0 tersebut akan bertransformasi menuju Society 5.0 (Gambar 1) yang pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang pada tahun 2016. Society 5.0 menitikberatkan pada kolaborasi antar individu dan organisasi sehingga tujuan umum yaitu kesejahteraan sosial dapat terwujud lebih baik dan lebih mudah. Hal tersebut karena lahirnya sinergi dari keberhasilan kolaborasi antar pihak.



Gambar 1. Japan Society 5.0

Sumber: CAO Japan

Di samping itu, jika menilik lebih jauh pada cakupan terluas tentang isu strategis yang saat ini masih sangat relevan, perlu diperhatikan lebih jauh pada SDGs yang telah dicanangkan oleh PBB dan akan menuju target tahun 2030. SDGs hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerja sama global. Meskipun bantuan

pembangunan resmi dari negara-negara maju meningkat hingga 66 persen antara tahun 2000 sampai 2014, krisis kemanusiaan akibat konflik dan bencana alam terus menuntut bantuan dan sumber-sumber finansial. Banyak negara yang juga meminta bantuan pembangunan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan. Memperkuat solidaritas global adalah satu dari 17 Tujuan Global yang tersusun dalam SDGs 2030. Pendekatan terintegrasi dan kolaborasi sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan.



Gambar 2. SDGs Goal No. 17

Sumber: United Nation, 2015

Pada sektor pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. (Ansell dan Gash, 2008)

Enam kriteria penting Collaborative *Governance* menurut Ansell dan Gash (2018) adalah sebagai berikut:

- (1) Forum diprakarsai oleh organisasi pemerintah

- (2) Peserta dalam forum termasuk aktor non-negara
- (3) Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "dimintai pendapat" oleh badan publik
- (4) Forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif
- (5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktiknya)
- (6) Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Beberapa Model *Collaborative Governance* lainnya yang dikutip dari Taufiq (2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Model Collaborative Governance

	<i>Triple Helix</i>	<i>Quadruple Helix</i>	<i>Penta Helix</i>
<i>Multi-Stakeholders</i>	- <i>Public</i> - <i>Private</i> - <i>Academia</i>	- <i>Public</i> - <i>Private</i> - <i>Academia</i> - <i>Civic Society</i>	- <i>Public</i> - <i>Private</i> - <i>Academia</i> - <i>Assemblers: (social) Entrepreneurs or/ and Activists</i>
<i>Paradigms</i>	<i>PPP</i>	<i>Civic Universities</i>	<i>Urban Commons</i>
<i>Governance Scheme & Citizenship Response</i>	<i>Invisible Citizenship</i>	<i>Reactive Citizenship</i>	<i>Proactive Citizenship</i>

<i>Techno- Politics of Data</i>	<i>Technocratic Top-Down</i>	<i>Institutionalised Bottom-Up</i>	<i>Emergent & Complex Bottom-Up</i>
---	----------------------------------	--	---

Sumber: Taufiq, 2021

Kolaborasi sendiri dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan beberapa kategori. Misalnya, kerjasama nasional atau bilateral antar 2 (dua) negara saja dan kerjasama multilateral di tingkat regional (Misalnya AFTA dan KSS) maupun global (G20 dan BRICS+). Dalam hal ini, para pemimpin birokrasi pada level JPT Madya perlu menangkap potensi kolaborasi yang dapat berdampak baik bagi organisasi. Tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga perlu ekspansi di level internasional. Para JPT Madya menjadi agen Pemerintah Indonesia dalam menjalin kemitraan yang baik di dunia internasional sehingga tercipta keterkaitan antar pihak dan visi *world class government* bagi tataran birokrasi Indonesia dapat terwujud.

C. Rangkuman

Isu strategis adalah suatu kondisi dimana serangkaian kejadian atau *event* yang sedang terjadi pada saat ini dan mengambil perhatian banyak pihak. JPT Madya perlu memperhatikan isu strategis sebagai acuan terkini karena secara tidak langsung, JPT Madya diuji untuk dapat mengimplementasikan standar kompetensi pada aspek “Mengelola Perubahan” dan “Pengambilan Keputusan” yang wajib dimiliki sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Kolaborasi juga menjadi unsur penting dalam trend isu strategis saat ini. Mulai dari pergeseran antara Revolusi Industri 4.0 menuju *Society* 5.0, hingga upaya mewujudkan *Partnership for the goals* berdasarkan

SDGs 2030. Terdapat beberapa model *Collaborative Governance* diantaranya *Triple Helix*, *Quadruple Helix* hingga *Penta Helix*.

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL

A. Definisi Kebijakan Nasional

Teori dari Somit dan Peterson yang dirangkum dalam Modul Pelatihan Analisis Kebijakan (2017) mendefinisikan kebijakan publik/nasional sebagai aksi pemerintah. Terdapat penekanan peran penting beberapa aktor dan bukan aktor tunggal dalam pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan aksi kolektif dari beberapa aktor. Aksi kolektif tersebut menjadi hal yang tidak mungkin dihindari mengingat proses menghasilkan kebijakan publik itu tidaklah sederhana. Seperti yang diyakini oleh Kay dalam Modul Pelatihan Analisis Kebijakan (2017), kebijakan publik/nasional didapatkan dari proses yang cukup rumit, mengingat bahwa terdapat beragam keputusan yang dihasilkan oleh beberapa aktor yang tersebar di seluruh organisasi pemerintah dalam tingkatan yang berbeda.

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik/nasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Di dalam Modul Analisis Kebijakan (2017) terangkum 3 (tiga) elemen kebijakan menurut Dunn yaitu: pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir karena tuntutan-tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik sosial ekonomi, sumber daya alam, iklim, topografi, demografi, budaya dan sebagainya.

B. Cakupan Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional bermakna langkah strategis Pemerintah yang dapat berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dimulai dari level tertinggi (dalam hal ini Presiden) hingga Menteri dan Kepala Lembaga/Badan Pemerintah yang mengatur hingga sampai tataran masyarakat. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tingkatan peraturan atau kebijakan pemerintah di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
3. Undang-undang (UU)/Peraturan pemerintah Pengganti UU (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/ Kota).

Isu strategis mendapat perhatian besar dengan berbagai alasan misalnya menyangkut kepentingan orang banyak, mencapai titik kritis untuk segera diselesaikan, berdampak luas pada masyarakat, berhubungan dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat, misal demokrasi, keadilan, keluarga, serta memiliki implikasi pada anggaran publik. Sumber masalah atau ketidakpuasan tersebut bisa dari masalah lama yang belum menjadi agenda publik sebelumnya, masalah yang benar-benar baru sebagai akibat pembangunan, sisa persoalan kebijakan sebelumnya atau pun karena adanya kegagalan dalam implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan nasional yang dihasilkan

perlu memperhatikan elemen-elemen penting yang disebutkan di atas meskipun cakupannya cenderung sempit.

C. Permasalahan Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional bukan berarti kebijakan ideal yang tidak memiliki kelebihan dan kekurangan saat proses implementasinya. Bahkan terdapat kesalahan sejak proses *agenda setting* atau formulasi kebijakannya. Pada saat ini, Indonesia masih berkuat pada angka kualitas kebijakan yang cukup rendah. Berdasarkan data *Worldwide Governance Indicators* yang diterbitkan oleh The World Bank pada tahun 2020, Indonesia hanya menempati posisi ke-lima (Tabel 2) di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand untuk kategori kualitas kebijakan suatu negara.

Tabel 2. South-East Asia Regulatory Quality

Indicator	Country	Year	Number of Sources	Governan (-2.5 to +2.5)	Percentile Rank	Standard Error
Regulatory Quality	Singapore	2020	8	2.21	100.0	0.2
	Brunei	2020	4	0.91	76.9	0.3
	Malaysia	2020	9	0.77	74.0	0.2
	Thailand	2020	9	0.18	58.7	0.2
	Indonesia	2020	10	0.08	55.3	0.2
	Philippines	2020	10	0.03	53.4	0.2
	Vietnam	2020	9	-0.15	46.6	0.2
	Cambodia	2020	9	-0.62	29.8	0.2
	Myanmar	2020	9	-0.63	28.4	0.2
	Timor-Leste	2020	6	-0.78	21.6	0.2
	Lao PDR	2020	8	-0.80	21.2	0.2

Sumber: *Worldwide Governance Indicators*, The World Bank, 2020

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperbaiki kualitas kebijakan yang dihasilkan. Proses pembuatan kebijakan yang diperkenalkan oleh Shafritz dan Russel di dalam Modul Analisis Kebijakan (2017) menyajikan bahwa kebijakan dimulai dengan sebuah siklus, dimulai dari (1) *agenda setting* dimana masalah-masalah

publik diidentifikasi menjadi masalah kebijakan, (2) memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) melaksanakan kebijakan (implementasi), (4) evaluasi kebijakan (baik berupa program atau kegiatan) beserta dampaknya, dan (5) melakukan umpan balik, yakni memutuskan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan, direvisi, atau dihentikan.

D. Rangkuman

Kebijakan nasional merupakan aksi atau ketetapan yang diambil oleh pemerintah. Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik/nasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Kebijakan Nasional mencakup seluruh lapisan masyarakat yang terdampak atas kebijakan yang telah ditetapkan. Pada saat ini, Indonesia masih berkuat pada angka kualitas kebijakan yang cukup rendah, oleh karena itu perbaikan kualitas kebijakan menjadi sebuah keharusan.

BAB IV

STRATEGI *DELIVERY* PEMBELAJARAN

A. Ceramah Isu Strategis

Ceramah dilakukan sebagai media penyampaian pembelajaran Isu Strategis. Strategi *delivery* pembelajaran juga dikombinasikan dengan berdiskusi baik dengan para pakar maupun sesama peserta tentang isu strategis dan isu yang relevan dengan materi pokok. Kegiatan ceramah disampaikan oleh penceramah yang merupakan pakar atau *expert* di bidang tertentu yang menjadi bahasan isu strategis dengan dimoderatori oleh widyaiswara atau pengampu mata pelatihan isu strategis.

B. Narasumber Isu Terkait

Penceramah atau narasumber sebagai figur utama dalam penyampaian materi pada mata pelatihan Isu Strategis menjadi sosok penting dalam keberhasilan peserta menangkap pembelajaran pada pelatihan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pelatihan untuk menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan sangat menguasai isu strategis yang akan diangkat dalam diskusi bagi peserta.

Kompetensi yang penguasaan materinya bersifat spesifik dan spesialisasi dimiliki oleh narasumber sangat diperlukan agar peserta mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan fokus terhadap isu aktual yang sedang *happening*. Sebagai contoh, jika saat ini tema yang diangkat oleh lembaga pelatihan terkait isu ketenagakerjaan berdasarkan implikasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penting bagi lembaga pelatihan untuk menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu inisiator pembuat kebijakan tersebut.

C. Metode

Proses pembelajaran mata pelatihan ini diberikan oleh pakar, praktisi, dan akademisi dalam bentuk seminar yang dipandu pengajar dengan metode diskusi dan *e-learning*. Alokasi waktu yang diberikan untuk ceramah isu strategis adalah 12 (dua belas) JP. Pada umumnya, terdapat 4 (empat) kali sesi ceramah isu strategis yang terdiri masing-masing 3 (tiga) JP di tiap sesinya. Penyelenggara pelatihan dan para peserta dapat bersinergi dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang aktual dan penting untuk dipelajari oleh peserta di dalam ekosistem pembelajaran.

D. *Benchmarking* Kebijakan

Benchmarking kebijakan adalah suatu kegiatan studi lapangan dan bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik (*good practice*) dan/atau praktik terbaik (*best practice*) dalam mengelola kebijakan sesuai dengan tema pembelajaran yang telah ditetapkan yang meliputi perumusan kebijakan, model implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses pembelajaran mata pelatihan ini diberikan dengan menggunakan metode *e-learning* maupun metode pembelajaran dalam kelas secara interaktif untuk memahami konsep yang terkait dengan *benchmarking* kebijakan, melakukan kunjungan ke lokus sesuai tema pembelajaran dan diskusi dengan dipandu pengajar dan/atau penceramah di lokus. Pemilihan lokus dan tema-tema yang didiskusikan saat studi lapangan tidak lepas dari pemilihan materi pada mata pelatihan isu strategis kebijakan.

E. Policy Paper

Policy Paper akan membekali Peserta dengan kemampuan mendemonstrasikan hasil belajar yang telah diperoleh ke dalam praktek penyelesaian isu strategis yang dituangkan ke dalam *Policy Paper* dan melakukan advokasinya. Kegiatan advokasi yang dimaksud dapat berupa kolaborasi lintas instansi/sector dalam mengatasi isu strategis nasional yang dituangkan ke dalam *Policy Paper* dan melakukan presentasi kepada pemangku kepentingan terkait.

F. Rangkuman

Strategi *Delivery* Pembelajaran pada PKN Tingkat I diantaranya melalui:

- Ceramah Isu Strategis
- Pemilihan Narasumber Isu Terkait
- Metode penyampaian
- *Benchmarking* Kebijakan
- *Policy Paper*

BAB V

PENUTUP

Dengan membaca dan memahami modul ini peserta diharapkan dapat memiliki bekal untuk mempelajari isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis pada masa sekarang ini. Mata Pelatihan selanjutnya di antaranya *Benchmarking* Kebijakan dan penugasan membuat *Policy Paper* sangat dapat merujuk pada isu-isu strategis yang telah dipelajari. Sehingga, visi awal peluncuran kurikulum Pelatihan Kepemimpinan *Smart Governance* dapat terimplementasi dengan baik dan memberi dampak positif bagi organisasi dan publik secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Buku*

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.

Asrar, M. (2018). Indikator Kualitas Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Negara, L. A. (2017). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.

Taufiq, M. (2021). Pemulihan Sosial Ekonomi Melalui Kolaborasi.

2. *Peraturan*

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara.

Peraturan LAN No. 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.

3. *Media Elektronik*

CAO Japan. Society 5.0 Retrieved from https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html

United Nation. Sustainability Development Goals. Retrieved from <https://sdgs.un.org/goals>

Worldwide Governance Indicators. (2020). The World Bank Retrieved from <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>